

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, sistem akuntansi pemerintah di Indonesia terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun yang diikuti dengan perubahan dasar hukum yang berlaku. Dengan berlakunya otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam manajemen keuangan daerah, termasuk dalam sistem penerimaan kas, pencatatan, penganggaran, perbendaharaan sampai pada pertanggungjawaban laporan keuangan.

Penerimaan kas adalah semua uang atau dana yang diterima oleh suatu entitas, baik organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintah, dari berbagai sumber pendapatan dalam bentuk tunai atau transfer elektronik. Dalam konteks organisasi pemerintahan atau perusahaan, penerimaan kas mencakup semua aliran masuk yang berasal dari penjualan, layanan, pembayaran hutang, pajak, penyewaan terhadap bangunan dan bentuk pendapatan lainnya.

Dalam pengelolaan keuangan, penerimaan kas memainkan peran penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan entitas untuk menjalankan operasional, membiayai program, dan melakukan investasi. Penerimaan kas harus dikelola dengan sistem yang baik, termasuk pencatatan yang akurat dan pengendalian internal yang kuat, untuk memastikan keuangan tetap terkontrol, transparan, dan terhindar dari kesalahan atau penyelewengan. Pengelolaan penerimaan kas yang efektif juga

merupakan indikator kesehatan finansial suatu organisasi dan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Dalam mewujudkan good governance, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Good Governance dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan mekanisme pasar yang efektif, serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Di Indonesia konsep good governance mulai diadopsi pada akhir tahun 1990, terutama setelah reformasi 1998 dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law. Penerapan good governance akan terus berkembang dengan mengikuti kebijakan undang-undang yang mendukung tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, tata kelola pemerintah yang baik ditandai oleh tiga pilar penting diantaranya, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dari setiap instansi pemerintah agar terciptanya lingkungan yang dapat memacu perilaku yang positif dan manajemen yang baik. Terutama dapat mendorong seluruh pihak agar memiliki tanggung jawab dan kesadaran tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada lingkungan pemerintah pengendalian internal disingkat dengan SPIP yaitu sistem pengendalian internal pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan tujuan, pengendalian internal diharapkan dapat membantu kinerja pegawai dalam mengoptimalkan kinerjanya dan memastikan bahwa operasi pemerintah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pengendalian internal mendukung pengambilan keputusan yang berbasis informasi dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan, serta berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat dan dapat dipercaya, sehingga memberikan informasi yang benar terhadap pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Dalam era kontemporer, keberadaan sistem informasi akuntansi sangat signifikan dalam mendukung efektivitas kinerja perusahaan atau instansi, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya dalam pengelolaan laporan keuangan. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi, data transaksi keuangan yang dihasilkan oleh dinas dapat dicatat, disimpan, dan diolah secara terstruktur dan efisien. Sistem ini memungkinkan pencatatan yang lebih akurat, mengurangi risiko kesalahan manual, serta memastikan bahwa setiap transaksi kas dan keuangan tercatat dengan baik.

Selain itu, sistem tersebut juga mempercepat proses pengolahan data transaksi, sehingga laporan keuangan dapat disusun lebih cepat dan tepat waktu. Hal ini sangat penting bagi setiap instansi pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merupakan perwakilan dari lembaga kementerian ketenagakerjaan untuk wilayah provinsi Sumatera barat, dengan tugas utama merumuskan, mengkoordinasikan, dan menyelaraskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini berfungsi merumuskan kebijakan teknis, mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik terkait tenaga kerja dan transmigrasi, serta melakukan pembinaan dan fasilitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab atas administrasi, pelatihan tenaga kerja, hubungan industrial, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tersebut. Dinas juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai fungsi dan wewenangnya. Program pelatihan yang disediakan meliputi berbagai kejuruan, seperti otomotif, kelistrikan, bangunan, bahasa, pertambangan, tata niaga, dan pertanian, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta masyarakat transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kerap menghadapi berbagai permasalahan internal, terutama terkait penerimaan kas. Masalah tersebut dapat berupa ketidaktepatan pencatatan, keterlambatan dalam proses rekonsiliasi data, hingga kurangnya koordinasi antar unit yang terlibat dalam

pengelolaan keuangan. Selain itu, kurangnya potensi sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola keuangan juga berpotensi meningkatkan risiko penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerimaan kas, lemahnya pengawasan terhadap setiap penerimaan dapat menimbulkan terjadinya kebocoran atau bahkan penyalahgunaan kas. Hal ini menegaskan perlunya upaya perbaikan dalam pengendalian internal, agar kinerja organisasi dapat lebih efektif dan efisien dalam melayani kepentingan public.

Dengan begitu, pengendalian internal dianggap penting untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan instansi pemerintah, terutama dalam hal pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, instansi dapat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat secara akurat, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga mengurangi risiko terjadinya kesalahan, penyelewengan, dan penyalahgunaan dana. Selain itu, pengendalian internal yang efektif juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, yang merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam melakukan kegiatan yang berada pada instansi pemerintah, diperlukan sistem informasi akuntansi pada pengendalian internal terkait penerimaan kas, agar alur penerimaan dan pengeluaran kas dapat terpantau dengan lebih transparan dan akurat. Dengan adanya sistem ini, setiap transaksi keuangan akan tercatat secara real-time dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas topik tersebut melalui proposal magang dengan judul **"IMPLEMENTASI**

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN KAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah dari proposal magang yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana sistem informasi akuntansi atas penerimaan kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana Solusi untuk meningkatkan pengendalian internal terhadap penerimaan kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari kegiatan magang yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian internal atas penerimaan kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi atas penerimaan kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk meningkatkan pengendalian internal terhadap penerimaan kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Kegiatan magang merupakan salah satu cara untuk mempelajari penerapan pekerjaan nyata diperusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil laporan magang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penerimaan kas sehingga dapat meningkatkan mutu dan kinerja dalam instansi tersebut, selain itu hasil laporan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas paada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi Akademisi

Laporan magang dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta informasi mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai rujukan bagi para akademisi untuk lebih mengembangkan teori dan praktir terkait sistem pengendalian internal khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

3. Bagi Mahasiswa

Magang memberikaan berbagai manfaat penting bagi mahasiswa, mulai dari pengembangan keterampilan praktik hingga peningkatan peluang karir. Dengan terjun langsung kedunia kerja, dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga meningkatkan pemahaman tentang bidang yang sedang digeluti. Magang juga membantu

mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan soft skill, seperti komunikasi, kerja tim, dan manajemen waktu, yang sangat berguna dalam lingkungan profesional. Selain itu, mahasiswa dapat mendalami lebih lanjut peran sistem informasi terhadap pengendalian internal atas penerimaan kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Adapun tempat yang dipilih sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Kota sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan atau magang yang berlangsung selama 40 hari. Penulis berharap agar kegiatan magang ini dapat dilaksanakan dengan optimal.

1.6 Metode Magang

Kegiatan penelitian dilakukan dengan melakukan magang pada instansi pemerintahan yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan selama 40 hari, dengan menggunakan metode observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi langsung instansi pemerintah untuk melakukan pengamatan dan meneliti secara langsung, dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi yang terdapat pada Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak meluas, penelitian akan terkonsentrasi pada Implementasi Sistem Pengendalian Internal terkait Penerimaan Kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

1.8 Sistematika Penulisan Laporan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang, yang dimana menggambarkan relevansi topik yang akan dibahas pada bab berikutnya. Selanjutnya, terdapat Rumusan Masalah, pada rumusan masalah penulis mengidentifikasi pertanyaan utama yang ingin dijawab, serta membantu memperjelas fokus penelitian. Kemudian, penulis menyampaikan Tujuan dan Manfaat magang serta Sistematika Penulisan Laporan Magang.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bagian ini, penulis menguraikan mengenai tinjauan Pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi landasan teori dalam menyelesaikan laporan magang ini. Landasan teori berfungsi sebagai acuan teoritis untuk memahami fenomena yang diteliti, sekaligus memberikan konteks ilmiah bagi permasalahan yang akan diangkat.

3. BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan bagian informasi mendetail tentang Perusahaan yang menjadi objek penelitian. Bagian ini mencakup Sejarah dan perkembangan Perusahaan, visi dan misi, logo dan struktur organisasi Perusahaan.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan hasil studi lapangan selama berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyangkut Implementasi pengendalian internal terhadap penerimaan kas.

5. BAB V PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari laporan magang yang berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Pada bagian ini, penulis menyampaikan Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan utama dari penelitian, yang menjawab mengenai rumusan masalah yang diajukan diawal. Selain itu, bagian penutup juga memuat saran yang diberikan penulis, baik untuk pihak yang terkait, maupun pengembangan dibidang yang diteliti.

